

BAB II

DIMENSI SOSIAL, EKONOMI, LINGKUNGAN, SERTA POLITIK

INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Pada bab II ini penulis akan membahas dimensi sosial, ekonomi, politik industri kelapa sawit Indonesia. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan industri kelapa sawit mulai dari munculnya industri kelapa sawit di Indonesia hingga kelapa sawit menjadi tanaman primadona Indonesia yang pertumbuhannya semakin pesat. Bab II ini juga akan menjabarkan peranan kelapa sawit pada perekonomian Indonesia. Kemudian, penulis menjelaskan dimensi yang timbul dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta politik Indonesia.

Ada alasan tersendiri menurut penulis mengapa dalam bab II ini membahas mengenai dimensi industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini karena industri dari masa ke masa dianggap sebagai salah satu perusak lingkungan hidup termasuk industri kelapa sawit terhadap lingkungan nasional maupun global. Hal ini ditambah dengan tidak adanya suatu standar baku tentang pengolahan industri kelapa sawit Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dari segala sisi kehidupan.

A. Perkembangan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah Indonesia hadir sebagai negara penghasil sebagai negara penghasil rempah-rempah dan sumber pangan lainnya. Indonesia memiliki kontur tanah dan letak geografis yang sangat strategis, memiliki tanah yang subur karena terletak pada *ring of fire*

aktivitas vulkanisme dunia. Hasil pertanian Indonesia semakin menjanjikan kesejahteraan untuk masyarakat seiring dibukanya perkebunan-perkebunan di Indonesia. Keadaan iklim yang sub-tropis sebab terjadi keseimbangan antara siang dan malam serta volume curah hujan yang baik menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk pertanian utama untuk kebutuhan pangan dunia. Beberapa komoditi perkebunan utama yang hanya bisa dikembangkan di negara beriklim sub-tropis; semakin menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara pengekspor rempah-rempah maupun hasil komoditi perkebunan lainnya ke berbagai negara di dunia. Salah satu komoditi yang dimaksud adalah minyak kelapa sawit:

Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun. Peranan kelapa sawit ini mulai terlihat pada tahun 1911. Pada tahun ini tumbuhan kelapa sawit ini mulai dikomersialkan.¹² Hingga pada tahun 1919 dan 1923 ekspor minyak dan inti sawit dimulai, pada masa ini permintaan minyak sawit di pasaran dunia memang sedang meningkat sejalan dengan makin berkembangnya industri di Eropa.¹³

Pola pembangunan industri kelapa sawit selalu berubah secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Peraturan dan kebijakannya pun selalu berubah. Pola pembangunan kelapa sawit tersebut dapat dikelompokkan

¹² Keisya Gandestia Adity, *Transnasionalisme Kelapa Sawit (Studi Pengaruh RSPO Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia disektor Perkebunan Kelapa Sawit)*, Skripsi HI UMY 2011, hal.

55

¹³ *Ibid.*

melalui Periode pemerintahan pada masa tersebut, seperti:¹⁴ pada 1600-1942, periode pertama pada masa penjajahan Belanda, 1942-1945, Periode kependudukan Jepang, 1945-1955, Periode revolusi fisik beberapa tahun setelah Indonesia merdeka dan pemulihan perkebunan, 1956-1990-an, Periode pengalihan (*nasionalisasi*) perkebunan dari swasta asing ke PNP/PTP dan berkembang pada pemerintahan orde baru, Periode pembangunan perkebunan 2000-2004 dan awal pelaksanaan UU perkebunan No. 18 tahun 2004.

Pada periode pembangunan perkebunan 2000-2004 dan awal pelaksanaan UU perkebunan No.18 ini masa pemerintahan yang sedang bergulir adalah periode reformasi yaitu suatu periode pemerintahan setelah tergulingnya pemerintahan orde baru. Pada periode reformasi, dengan era reformasi kewenangan pengolahan perkebunan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah (*otonomi daerah*). Kebijakan dan peraturan pengolahan industri kelapa sawit berasal dari pemerintah provinsi kemudian diturunkan kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi mengatur kebijakan yang terbaik bagi wilayah dan provinsi tersebut, sehingga menimbulkan adanya politik dan kebijakan yang sentralisasi tiap-tiap provinsi.

Kegiatan pembangunan pada masa ini tertuang pada UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Diserhkannya pembangunan kepada pemerintah daerah merubah paradigma pembangunan kelapa sawit Indonesia yang semula dikelola oleh pemerintah pusat. Perubahan paradigma ini berupa

¹⁴ *Ibid*, hal 43

pendekatan sektoral kependekatan jejaring kerja, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari sistem komando menjadi sistem pasar bebas, dari ketergantungan kesaling membutuhkan, dan dari pendekatan produksi menjadi pendekatan produktivitas. Visi pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui sistem dan usaha perkebunan yang efektif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Melalui penetapan UU Perkebunan No.18/2004 maka peta perjalanan perkebunan di Indonesia akan mengalami perubahan yang mendasar karena tantangan dan peluang disektor perkebunan akan semakin bertambah sejalan dengan masuknya perkebunan ke pasar internasional.¹⁵

Seperti yang kita ketahui selama beberapa dekade terakhir ini industri kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan dalam menghasilkan devisa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelapa sawit memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemasukan devisa negara sektor non-migas, perannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, total devisa yang dihasilkan industri ini mencapai US\$ 2,6 miliar atau 4,3% dari total ekspor Indonesia seluruhnya yang mencapai US\$ 61 miliar. Nilai ekspor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding nilai ekspor 2002 yang mencapai US\$ 2,35 miliar (4,11% terhadap total nilai ekspor seluruhnya), maupun nilai ekspor pada 2001 yang mencapai US\$ 1,23 miliar (2,18% terhadap total nilai ekspor seluruhnya). Hingga pada tahun 2010 sebesar US\$ 15 miliar nilai export yang

¹⁵ Pahan Iyung, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Depok, Penebar Swadaya, Anggota IKAPI, 2008, hal 46-47.

diterima sebagai devisa, jumlah ini setara dengan 12,5 % dari total export indonesia di 2009 (sebesar US\$ 116,5 miliar)¹⁶. Nilai total ekspor kumulatif selama Januari-November 2011 sudah mencapai 186,11 miliar US\$ di mana 148,45 miliar US\$ di antaranya terdiri atas komoditas nonmigas.¹⁷ Selain itu, jumlah permintaan terhadap produk ini terus meningkat dibandingkan dengan minyak lain yang diproduksi dunia. Banyaknya permintaan produk ini disebabkan beberapa keunggulan minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya. Serta manfaat lainya sebagai sumber energi alternatif atau biodiesel.¹⁸

Peningkatan jumlah permintaan terhadap kelapa sawit seiring dengan meningkatnya populasi dunia hingga tahun 2011 sebesar 7 juta jiwa.¹⁹ Tabel 1 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-ketahun, serta diperkirakan tahun 2012 akan terus mengalami peningkatan hingga 50,8 juta ton.²⁰ Ceraahnya prospek komoditi minyak sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan

¹⁶ *Facts Of Indonesian Oil Palm*, first edition, Indonesia Palm Oil Advocacy Team - Indonesian Palm Oil Board (TAMSI-DMSI), 2010, hal 14.

¹⁷ BPS: Target Ekspor 2011 Terlampaui, *Ekonomi - / Rabu, 1 Februari 2012 13:16 WIB*, *Metrotvnews.com*, Jakarta, di akses pada 24 feb 2012, 09:15 melalui <http://www.metrotvnews.com/sukses.php/read/news/2012/02/01/80507/BPS-Target-Ekspor-2011-Terlampaui>

¹⁸ Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, *Biodiesel: Energi Terbarukan Ramah Lingkungan*, Warta Penelitian dan pengembangan Pertanian Vol. 30 No. 4 2008.

¹⁹ Ambono Janurianto, *Challenges on Environmental & Social Issues on Palm Oil Supply & Demand*. Bakrie Sumatera Plantations, dipersentasikan pada 7th Indonesia Palm Oil & 2012 Price Outlook Sustainable Palm Oil: Driver of Change, Bali, 1 – 2 December 2011.

²⁰ *Ibid*.

kelapa sawit. Selama 14 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit menjadi 3.320.000 ha.²¹

Berdasarkan data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (*Apkasindo*), luas kebun kelapa sawit Indonesia di 2010 secara keseluruhan adalah seluas 7,796 juta ha yang sudah ditanami sebesar 5,7 juta ha. Sampai saat ini Indonesia terus berupaya melakukan ekspansi luasan perkebunan kelapa sawit untuk dapat memenuhi target produksi sebesar 40 juta ton CPO pada tahun 2020.²² Setidaknya dibutuhkan lahan seluas 4 juta ha dari 8 juta ha luas perkebunan sawit Indonesia saat ini (2010).

Tentu saja peningkatan produktifitas yang ditargetkan pemerintah seiring dengan ekspansi kelapa dan konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut Ketua Bidang Pemasaran GAPKI (*Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*) Susanto, total luas lahan sawit di Indonesia pada 2010 mencapai 7,9 juta ha dengan luas ekspansi sekitar 200 ribu ha dan maksimal 250 ribu ha dengan area potensial sebesar 24,5 juta ha.²³ Sebagian besar ekspansi sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.²⁴ Untuk catatan bagi kita bahwa jumlah produksi sawit sebesar 3-4 ton/ha dalam satu tahunnya.

²¹ Evi Thelia Sari dan Chandra Wijaya, *Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Untuk Perbaikan Taraf Hidup Rakyat Dan Isu Pemanasan Global : Pendekatan Utilitarian Pada Agribisnis*, Oil World Annual 2004

²² Ninik Setrawati, *Produksi Sawit RI Tertinggi, Tapi 22% Lahan Dikuasai Malaysia*, *detikFinance*, Kamis, 27/01/2011 16:39 WIB, diakses pada <http://detikfinance.com>, Selasa, 12 Juli 2011.

²³ Haryono, *Palm Oil Unit WWF Indonesia, Tantangan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan*, disampaikan pada seminar nasional INSTIPER Yogyakarta pada 07 Januari 2012.

²⁴ Alina Mustaidah, *Ekspansi Lahan Sawit Maksimal 250 Ha*, 12 Jan 2011, diakses pada Selasa, 12 Juli 2011 bataviase.co.id

Perkembangan produktifitas kelapa sawit di Indonesia juga memberikan Indonesia posisi yang sangat penting dalam perindustrian kelapa sawit dunia. Indonesia merupakan produsen minyak sawit kedua terbesar dunia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 tentang negara produsen kelapa sawit dunia. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produktifitas perkebunan kelapa sawit dapat dilihat melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (*MP3EI*): Melalui strategi mengembangkan koridor ekonomi Indonesia yang dilakukan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya unggulan. Program ini disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No: 32 Tahun 2011 dimana wilayah di Indonesia berkembang melalui potensi masing-masing.²⁵

Namun peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk mengatur industri kelapa sawit Indonesia ini belum mampu menjawab berbagai masalah yang timbul akibat industri kelapa sawit ini. Perkembangan pembangunan industri kelapa sawit ini semakin menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Seiring ekspansi dan konversi lahan berbagai masalah bermunculan baik dari segi politik, sosial, dan budaya, lingkungan, serta masalah ekonomi. Meskipun pada awalnya industri ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan taraf ekonomi masyarakat, serta pembangunan wilayah.

²⁵ "MP3EI sebuah kesempatan?" persentasi Menko Perekonomian, Feb dan Mei 2011.

B. Potensi dan Prospek Industri Kelapa Sawit Indonesia

Kelapa sawit merupakan salah satu produk perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan industrinya termasuk padat karya. Manfaat dari buah kelapa sawit sendiri sangat bervariasi. Cukup banyak industri lain yang dapat menggunakan sebagai bahan baku produknya, seperti minyak goreng, makanan, kosmetik, sumber bahan bakar alternatif, dan lain-lain.

Cerahnya prospek kelapa sawit semakin menjadikan kelapa sawit topik perbincangan dunia. Di tengah-tengah semakin gencarnya dunia mencari sumber energi baru pengganti minyak bumi dengan memanfaatkan minyak mentah *Crude Palm Oil (CPO)* untuk energi *biodiesel*. Biodiesel ini merupakan energi alternatif yang ramah lingkungan, selain itu sumber energinya dapat terus dikembangkan karena berasal dari tumbuhan.

Pertumbuhan permintaan CPO tidak hanya disebabkan dengan adanya pengembangan energi alternatif tersebut, tetapi juga disebabkan kenaikan permintaan yang disebabkan oleh pertumbuhan industri hilirnya, serta peningkatan konsumsi masyarakat dunia seiring dengan semakin tingginya angka populasi penduduk dunia. Indonesia sebagai produsen utama memiliki peluang untuk dapat memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut, dengan berkonsentrasi membangun industri kelapa sawit dan infrastruktur pendukungnya:

1. Perkembangan Minyak Kelapa Sawit Dunia

Konsumsi minyak sawit (*CPO*) dunia terus mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan CPO dunia rata-rata tumbuh

sebesar 9,92%. China dengan Indonesia merupakan negara yang paling banyak menyerap CPO dunia. Selain itu negara Uni Eropa juga termasuk konsumen besar pengonsumsi CPO di dunia²⁶. Dalam tujuh tahun terakhir, konsumsi minyak sawit dunia meningkat tajam. Pada tahun 2009, konsumsi minyak sawit mencapai 42 juta ton, di 2010 sebesar 46,45 juta ton.²⁷ Pada tahun 2011 jumlah konsumsi dunia sebesar 48,79 juta ton dari total konsumsi minyak nabati dunia sebesar 152,77 juta ton.²⁸

Seiring dengan meningkatnya konsumsi dunia, ekspor CPO menunjukkan peningkatan. Rata-rata peningkatannya adalah sebesar 11%. Eksportir terbesar di dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia, kedua negara tersebut menguasai 91% pangsa pasar ekspor dunia. Papua Nugini berada di urutan ke-3 dengan perbedaan ekspor yang sangat jauh, hanya berkisar 1,3%.²⁹

Konsumsi dan ekspor ini akan terus meningkat hingga pada angka persentase yang lebih tinggi mengingat banyak faktor yang mendukung peningkatan tersebut, seperti: pertumbuhan penduduk, pertumbuhan industri hilir, perkembangan energi alternatif, dan sebagainya.³⁰ Malaysia dan Indonesia diprediksikan akan terus menjadi pemain utama dalam ekspor CPO ini, mengingat belum ada perkembangan yang

²⁶ *Facts Of Indonesian Oil Palm*, first edition, *Op Cit* hal 29.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ambono Janurianto, *Op Cit*, hal 29.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

signifikan dari negara pesaing lainnya. Bahkan, Indonesia unggul dalam produksi maupun ekspor CPO dibandingkan negara produsen lainya seperti Malaysia, hal ini didukung oleh ketersediaan lahan potensial di Indonesia yang diperkirakan mencapai lebih dari 24,5 juta hektar.

2. Kondisi Dalam Negeri

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional cukup besar. Dalam enam tahun terakhir rata-rata 6,17% pertahun dan setiap tahun cenderung terus mengalami peningkatan. Ekspor CPO Indonesia setiap tahunnya juga menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 12,97%.³¹

Sampai dengan tahun 2005 luas perkebunan kelapa sawit yang teranam di Indonesia adalah 5,6 juta ha, yang terdiri dari: perkebunan rakyat 1,9 juta ha, perkebunan pemerintah 0,7 juta ha, dan perkebunan swasta 3,0 juta ha. Rata-rata pertumbuhan lahan per tahun sebesar 15% atau 200.000 ha per tahun. Sementara itu, produksi kelapa sawit Indonesia di tahun 2005 telah mencapai 17 juta ton meningkat 63,7% dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 10,4 juta ton. Hingga tahun 2010 mencapai 7,9 juta ha dengan total produksi sebanyak 21,5 juta ton atau 47% dari produksi dunia.³²

³¹ Tryfino, *Potensi dan Prospek Industri Kelapa Sawit Indonesia*, EconomicReview, No. 206 Desember 2006.

³² *Term of reference/Kerangka Acuan*, Workshop penerapan praktek terbaik pada perkebunan kelapa sawit di lansekap Heart of Borneo (HoB), WWF Indonesia program Kalimantan Barat, Sintang, 23-24 Juni 2011.

Sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terletak di Pulau Sumatera (69%) disusul Pulau Kalimantan (26%).³³ Dengan adanya rencana pemerintah membangun 850 km perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan maka pada tahun 2020 diprediksikan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan menjadi 9 juta ha sehingga lahan kelapa sawit di Kalimantan naik menjadi 35% sebaliknya Sumatera turun menjadi 56%.³⁴ Pengembangan industri kelapa sawit nasional sangat prospektif karena saat ini pemerintah Indonesia sedang menjalankan program pengembangan *biodiesel* yang menggunakan CPO sebagai bahan bakunya. Dengan demikian kapasitas penyerapan CPO akan jauh lebih besar lagi disamping nilai tambahnya juga akan semakin tinggi.

C. Dampak Sosial dan Lingkungan dari Industri Kelapa Sawit Indonesia

Berbagai dimensi muncul dari perkembangan industri kelapa sawit Indonesia: Hal ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut dijelaskan mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan masyarakat baik secara umum maupun disekitar industri kelapa sawit Indonesia:

1. Dampak sosial

a. Peningkatan Devisa Negara

Volume ekspor kelapa sawit Indonesia pada 2009 meneapai 15,5 juta ton juta ton, di mana sebelumnya pada 2005 sebesar 10,37 juta ton. Nilai ekspor tahun

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

2009 mencapai US\$ 9,14 miliar yang hampir 250% dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2005 yang mencapai US\$ 3,76 miliar. Tahun 2003 US\$ 2,6 miliar, 4,3% dari total ekspor Indonesia US\$ 61 miliar, Tahun 2002 US\$ 2,35 miliar, 4,11%, Tahun 2001 US\$ 1,23 miliar 2,18%. Dan tahun Tahun 2010 sebesar US\$ 15 miliar, setara dengan 12,5 % dari total export Indonesia thn 2009 (US\$ 116,5 miliar).³⁵ Nilai total ekspor kumulatif selama Januari-November 2011 sudah meneapai 186,11 miliar US\$ dimana 148,45 miliar US\$ diantaranya terdiri atas komoditas nonmigas.³⁶

b. Pengembangan Wilayah

Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, daerah mencapai 7,3 juta ha yang tersebar di seluruh Indonesia.³⁷ Penyebaran industri kelapa sawit ini turut mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah:

Pembangunan daerah melalui budidaya kelapa sawit di Indonesia menyebar dari Sumatera ke Papua. Saat ini, minyak sawit lebih berkembang di Kalimantan, Sulawesi dan Papua karena mereka masih memiliki ketersediaan lahan. Pembangunan industri kelapa sawit di daerah – daerah mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

³⁵ BPS, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2010

³⁶ Ambono Janurianto, *Op Cit*, hal 29, 33.

³⁷ *Ibid*.

Kelapa sawit mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya seperti layanan (jasa), telekomunikasi dan transportasi. Oleh karena itu, industri minyak sawit menjadi roda perekonomian lokal dan nasional. Laba bersih petani kecil dengan 2 ha kepemilikan tanah adalah US\$ 2-4 juta/bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Total produksi minyak kelapa sawit petani kecil pada tahun 2010 adalah 7,6 juta ton, Jumlah lahan petani plasma pada tahun 2010 adalah 3,0 juta hektar, 2,0-2.1 juta rumah tangga yang menjadi petani plasma kelapa sawit.³⁸

d. Industri Kelapa Sawit Sebagai Solusi Mengurangi Pengangguran:

Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor hulu mencapai 1,95 juta orang di perkebunan negara dan swasta, sementara 1,7 juta petani di perkebunan rakyat. Para pekerja di pabrik kelapa sawit mencapai 70.000 orang. Total pekerja diserap dari perkebunan minyak sawit ke pabrik kelapa sawit mencapai 3.720.000 orang. Industri menengah dan hilir menyediakan lapangan kerja bagi 31.664 orang. Total tenaga kerja untuk industri kelapa sawit hingga 3,75 juta orang.³⁹ Jumlah tenaga kerja yang terserap tentunya akan lebih besar lagi jika ditambah ke sektor hilir maupun jasa.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perannya terhadap pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga kerja Industri kelapa sawit, jika dilihat dari dimensi ekonomi dan sosial lainnya ternyata masih terjadi pelanggaran HAM dan masalah sosial lainnya. Seperti terjadinya kemiskinan struktural, pembagian hasil yang tidak sesuai aturan, kesenjangan pendapatan,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Facts Of Indonesian Oil Palm, *Op Cit*, hal 29, 33.

serta kompensasi yang tidak diberikan, hingga pertumbuhan penduduk yang sering tidak mendapat perhatian.⁴⁰ Upah buruh yang rendah dengan mempekerjakan anak usia belia juga sering dilakukan oleh para pihak industri untuk menekan biaya produksi. Perusahaan kelapa sawit lebih suka memperoleh akses atas lahan yang berdampingan karena alasan *economies of scale* yang signifikan dalam membersihkan, menanami dan mengelolah. Kebutuhan ini sering bertentangan dengan kebutuhan baik dari perseorangan maupun masyarakat setempat yang mungkin ingin mempertahankan akses atas lahan mereka. Sektor industri kelapa sawit sering menghadapi konflik lahan dengan masyarakat.

Laporan *Consortium on Agrarian Reform* pada tahun 2001⁴¹ menunjukkan bahwa konflik agraria berkaitan dengan perkebunan sebesar 32% atau 260 kasus. Pada tahun 2008, Sawit Watch mencatat dan memantau 570 konflik dalam perkebunan kelapa sawit, banyak berasal dari hak tanah masyarakat kurang diakui. Masyarakat adat berkontribusi tanah dan tenaganya untuk perkebunan kelapa sawit namun kehilangan kedaulatan atas tanah tersebut dan sumberdaya alami yang menjadi bagian inti dari identitas mereka. Sebagian masyarakat adat menolak skema perkebunan kelapa sawit sejak dari awal dan berupaya untuk mempertahankan integritas budaya dan ekonomi mereka.

⁴⁰ Cheng Hai Teoh, *Persoalan Keberlanjutan Kunci dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit*, International Finance Corporation, World Bank Group.

⁴¹ *Kerusakan Lingkungan Akan Berlanjut?*, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, 2010

2. Dampak Lingkungan

Jika dilihat dari dimensi lingkungan Kelapa sawit berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (CO₂). Hal ini dikarenakan kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk energi alternatif “biodiesel” yang bersifat ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi emisi hingga 62% dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Serta mampu mengurangi efek rumah kaca jika kelapa sawit di tanam pada wilayah-wilayah yang tidak kritis dan tandus. Namun yang terjadi adalah industri kelapa sawit lebih banyak membuka hutan lindung dan mengeringkan lahan gambut yang merupakan wilayah serapan gas karbon, serta pembukaan-pembukaan yang sangat merugikan lingkungan seperti dengan cara pembakaran dan pemusnahan habitat-habitat hewan langka.

Isu inilah yang menyebabkan produksi kelapa sawit Indonesia dinilai negatif di seluruh dunia. Indonesia menerima ancaman dari berbagai negara berupa pemboikotan ekspor minyak sawit. Serta beberapa multinasional importir minyak sawit terpaksa menyatakan sikap akibat mendapat desakan dari INGO seperti Greenpeace maupun WWF. Seperti kasus yang menimpa PT: SMART:

Greenpeace merupakan salah satu INGO lingkungan mengeluarkan laporan yang menyudutkan PT SMART. Laporan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan yang bersangkutan, tapi juga berdampak negatif terhadap pengembangan industri sawit nasional. Dalam Laporan yang diberi judul “*Illegal Forest Clearance and RSPO Green-wash; Case Study of Sinar Mas*”, ada tiga

tuduhan yang di tujukan kepada PT SMART seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.

PT SMART Tbk berkontribusi sekitar 10% produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. pada tahun 2008 menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Akhir 2008 perusahaan ini memiliki 392.000 ha perkebunan dengan pembagian 213.000 ha di Sumatera, 165.000 ha di Kalimantan dan 12.700 ha di Papua. Selanjutnya PT SMART Tbk memiliki areal lahan terbesar di dunia dengan 1,3 juta ha area lahan yang tersedia untuk ekspansi yang terletak di Kalimantan dan Papua. Tentu saja potensi lahan yang dimiliki perusahaan ini menjamah hutan tropis, yang akan menyebabkan deforestasi, sejumlah lahan gambut sebagai serapan karbon dan mengancam habitat oranghutan.⁴²

Pada tahun 2007 ditemukan fakta bahwa anak perusahaan PT SMART Tbk memiliki lahan luas di atas lahan gambut yang menurut UU tidak merupakan daerah konversi, tidak untuk dikembangkan, dibuka, atau dikeringkan, untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini dipaparkan oleh WWF Indonesia ironisnya kerusakan hutan di Kalimantan dan Sumatera jika konversi masih saja dilakukan tidak mustahil jika 2020 hutan di Kalimantan pun akan habis.

PT SMART Tbk mengekspor lebih dari 1 juta ton produk berbahan minyak kelapa sawit pada tahun 2007. India dan China tercatat menerima hampir separuh dari total ekspor. Sementara 200.000 ton untuk Italia, Belanda, Jerman,

⁴² Devi Andang Suryani, *Inefektifitas Peran WWF dalam Proses Ratifikasi the Asean Agreement on Transboundary Haze Pullutions (AATHP) oleh Pemerintah Indonesia*, HI UMY 2009, hal. 43

Spanyol, dan Inggris. PT SMART Tbk memasok minyak kelapa sawit ke beberapa MNC seperti Nestle dan Wilmar, termasuk Unilever, Proctor & Gamble, Henkel, Pizza Hut, MD, Burger King, Danone, AAK dan Cargil.⁴³

Tuntutan dari Greenpeace adalah agar konsumen meminta para pemasoknya untuk menerapkan moratorium pembukaan hutan dan lahan gambut untuk budidaya sawit serta membatalkan seluruh kontrak mereka dengan PT SMART Tbk. Bahkan pemerintah dan investor diminta pula untuk menghentikan pemberian izin dan pembiayaan bagi PT SMART Tbk.⁴⁴ Hal ini memaksa pemerintah Indonesia untuk mendukung penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO dan selanjutnya mengeluarkan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai solusi keberlanjutan produksi kelapa sawit Indonesia.

Selain kasus yang di atas, secara signifikan pelanggaran lain yang dilakukan oleh para pihak industri kelapa sawit nasional menurut *World Agriculture and the Environment* Clay (2004) yang adalah habitat kritis bagi kelompok binatang yang terancam punah, polusi udara dan pembakaran, erosi tanah, penggunaan pestisida serta penggunaan pupuk, penebangan hutan, dan kehilangan keanekaragaman nabati.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ "Sektor-Sektor Pulp dan Kelapa Sawit Mendorong Pengrusakan Hutan Hujan" Greenpeace, June 2011

a. Penebangan Hutan

Global Forest Resources Assessment (FRA) 2010⁴⁵ melaporkan bahwa tingkat kehilangan hutan secara menyeluruh masih sangat tinggi, khususnya di Amerika Latin dan Afrika. Namun demikian, diketahui bahwa tingkat penebangan hutan di Brasil dan Indonesia tertinggi pada tahun 1990an. Lenyapnya hutan di Indonesia khususnya hutan di pulau Kalimantan dari 73,7% tahun 1985 menjadi 50,4% tahun 2005, sedangkan proyeksi luas hutan pada tahun 2010 dan 2020 masing-masing sekitar 44,4% dan 32,6%.⁴⁶ Jumlah pengurangan hutan di Kalimantan dari 1985 sampai dengan 2002 adalah sekitar 13,3 juta hektar.⁴⁷

Hilangnya hutan di Sumatera juga sangat mencemaskan, khususnya di Provinsi Riau yang mempunyai hutan gambut dataran rendah paling luas. Berkurangnya hutan akibat penebangan dan terdegradasi dari tahun 1982 hingga 2007 sebesar 65% hutan, atau berkurang sekitar 4,2 juta ha. Hal ini diperkirakan akibat pengembangan perkebunan kayu 24% sedangkan kelapa sawit menyumbang 29%.⁴⁸

Penebangan hutan secara signifikan berdampak pada lingkungan hidup, termasuk hilangnya keanekaragaman nabati, perubahan iklim dalam skala lokal dan global serta perubahan hidrologis karena perubahan dalam penyimpanan endapan dan tingkat curah hujan. Ini berakibat pada hilangnya pelayanan

⁴⁵ Cheng Hai Teoh, *Op Cit.* hal 38.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

ekosistem yang berharga bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat sekitar yang tidak mempunyai sumber daya lainnya.

b. Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Menurunnya struktur habitat menyediakan ruang sempit bagi flora dan fauna. Hewan yang paling terancam punah adalah Harimau Sumatera, Gajah Asia dan Orangutan. Diantara kelompok binatang yang paling terancam adalah orangutan.

Menurut *World Conservation Union* (IUCN) orangutan kalimantan berstatus terancam, sedangkan orangutan Sumatera sebagai "sangat terancam". Populasi orangutan yang hidup liar di pulau Kalimantan berkisar antara 45.000 dan 60.000, sedangkan di Sumatera hanya tersisa 7.300 orangutan.⁴⁹ Hal ini dikarenakan meningkatnya tekanan perburuan serta pembukaan lahan untuk permukiman manusia. Sehingga berujung pada konflik antara manusia dan kelompok binatang ini.

c. Perubahan Iklim

Kekhawatiran tentang perubahan iklim karena pemanasan global awalnya fokus pada pembakaran bahan bakar fosil untuk industri dan alat transportasi. Tetapi, konversi hutan tropis yang semakin meluas juga menjadi sebab utama. Penebangan hutan memberikan kontribusi sekitar 18% untuk hilangnya penyerapan CO₂ secara signifikan. Selanjutnya, perkiraan emisi rata-rata 1.400 Mt/thn disebabkan oleh kebakaran lahan gambut selama periode

⁴⁹ *Ibid.* hal 30

1997-2006.⁵⁰ Indonesia sebagai penghasil emisi CO2 terbesar ketiga sedunia sesudah Cina dan Amerika Serikat.⁵¹ Penyumbang emisi lainya dari industri kelapa sawit adalah penggunaan api untuk pembersihan lahan, dan emisi gas metan dari limbah pabrik minyak kelapa sawit. Meskipun sudah adanya kesepakatan tentang *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* pada tahun 2002, namun penggunaan api untuk membersihkan lahan perkebunan terus dilakukan.

Pemenuhan *suplai* biodiesel yang dikembangkan berbagai negara juga merupakan resiko yang semakin besar dari dampak industri kelapa sawit. Sedikitnya untuk perluasan areal konversi hutan akan terus dilakukan dari tahun ketahun, luas kelapa sawit dalam kurun waktu 1999-2004 meningkat dengan laju 401.000 ha/tahun. Laju penambahan areal ini akan menjadi 600.000 ha dalam waktu 10 tahun mendatang, untuk menggantikan 2% kebutuhan solar nasional saja diperlukan 720.000 kiloliter biodiesel dari 200.000 ha pertanaman kelapa sawit.⁵²

d. Penggunaan Pestisida dan Pupuk.

Penyalahgunaan pestisida dan pupuk sering disebut sebagai dampak negatif pemeliharaan kelapa sawit. Pada umumnya, penggunaan pestisida cukup rendah apabila dibandingkan dengan banyak tanaman lainnya, namun beberapa bahan kimia yang digunakan merupakan risiko signifikan untuk

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* hal 31.

pengelola dan petani kecil serta lingkungan hidup. Penggunaan pupuk dalam jumlah besar dibutuhkan untuk kelapa sawit pada lahan tropis yang kurang subur. Dampak terhadap lingkungan hidup khususnya berhubungan dengan penggunaan yang salah sehingga mengakibatkan hilangnya air permukaan dan membutuhkan *eutrophication* (pengayaan nutrisi).⁵³ Sementara kebutuhan nutrisi untuk kelapa sawit umumnya di dasarkan pada analisis tanah dan daun-daunan, efisiensi dari penggunaan pupuk terkadang dipertanyakan.

Pemaparan di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa industri kelapa sawit merupakan industri yang memiliki potensi dan prospek yang cerah untuk perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di samping itu juga memberikan dampak pada kerusakan lingkungan dan masalah sosial lainnya. Untuk itu perlu solusi yang mampu menjembatani kedua aspek tersebut. Seperti yang kita ketahui, meskipun telah banyak peraturan tingkat nasional hingga daerah yang mengatur tentang perkebunan kelapa sawit beserta industri-industri kelapa sawit namun pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat tetap saja berlanjut.

Hadirnya RSPO merupakan inisiasi WWF yang dianggap sebagai suatu jalan keluar yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan kelapa sawit dunia. Ide RSPO berawal dari tanggung jawab bersama dengan menyatukan stakeholder di sepanjang rantai pasok industri kelapa sawit untuk duduk bermusyawarah mencari solusi yang terbaik untuk pembangunan industri kelapa sawit. Dengan prinsip dan kriteria

⁵³ *Ibid.* hal 34.

yang mampu memberikan wajah baru dari pengolahan industri kelapa sawit dunia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada bab selanjutnya penulis akan menjabarkan RSPO yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dari industri kelapa sawit tersebut. Bab berikut akan menjelaskan tentang kontribusi WWF sebagai inisiator RSPO dalam pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.